

ANALISIS HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan dambaan bagi setiap daerah bahkan negara. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti bila tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan penduduk masih tinggi. Kemiskinan juga terkait kondisi wilayah dan umumnya di daerah perdesaan tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibanding perkotaan karena biasanya rata-rata pendapatan masyarakat perdesaan yang relatif rendah. Sebaliknya, indikator ketimpangan pendapatan umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding dengan perdesaan karena variasi lapangan usaha pekerjaan dan status pekerjanya juga lebih beragam sehingga di perkotaan memungkinkan ada kelompok penduduk yang berpendapatan rendah dan ada yang sangat tinggi. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan ketiga indikator tersebut dan adakah hubungan timbal balik dari perkembangannya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, analisis silang antardua variabel, dan uji persamaan Granger. Berdasarkan referensi waktu analisis yang dipilih pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dengan kemiskinan. Demikian pula kemiskinan ternyata juga lepas kaitan dengan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan hubungan timbal balik.

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita merupakan indikator perekonomian yang sering dipakai untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara atau daerah. Meskipun demikian, banyak ahli ekonomi yang kurang sepakat karena banyak faktor-faktor lain di luar pendapatan yang dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut Dudley Seers, setidaknya ada tiga masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di berbagai bidang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Secara umum kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2014-2018 menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi cenderung terus meningkat meskipun di 2014-2015 sempat melambat. Pada periode yang sama, tingkat

pengangguran juga cenderung menurun meskipun relatif kecil karena angka pengangguran Daerah Istimewa Yogyakarta memang levelnya sudah rendah. Di sisi lain, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong masih tinggi bahkan tertinggi di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Selain itu tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang didekati dengan ketimpangan pengeluaran per kapita yang diukur dengan koefisien Gini (Gini Rasio) mempunyai kecenderungan stabil tetapi levelnya di moderat atas dan ketimpangan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teoritis hubungan ekonominya adalah pertumbuhan ekonomi memberi dampak pada penurunan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Namun demikian dampak tersebut tidak terjadi seketika tetapi ada *time lag* yang lamanya tergantung pada situasi perekonomian yang dikondisikan. Oleh karenanya dihipotesiskan ada hubungan yang jelas dan langsung antara pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan. Demikian pula hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan.

METODE ANALISIS

Lokus analisis ini adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup lima kabupaten/kota. Referensi waktu analisis yang utama adalah tahun 2014 hingga 2018, meskipun beberapa analisis menggunakan referensi waktu yang lebih panjang yaitu 2011 hingga 2018. Bahkan, ada yang diserieskan lebih panjang lagi yaitu 2008 hingga 2018. Identifikasi kemiskinan menggunakan kemiskinan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu penghitungan indeks FGT (Foster, Greer dan Thorbecke, 1984), yang terdiri dari Headcount Index (P_0), *Poverty Gap Index* (P_1), dan *Poverty Severity Index* (P_2).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu menjadi perhatian karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan yang relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran per kapita dan sumber datanya adalah data Susenas. Beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Rasio), Kriteria Bank Dunia (KBD), Indeks Theil, Indeks-L, dan rasio Q5/Q1. Dalam analisis ini hanya digunakan koefisien Gini (Gini Rasio).

Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan terhadap PDRB periode sebelumnya. Istilah LPE juga lebih sering sebagai pertumbuhan ekonomi. Sumber data pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB yang dirilis BPS setiap tahun dan juga triwulanan.

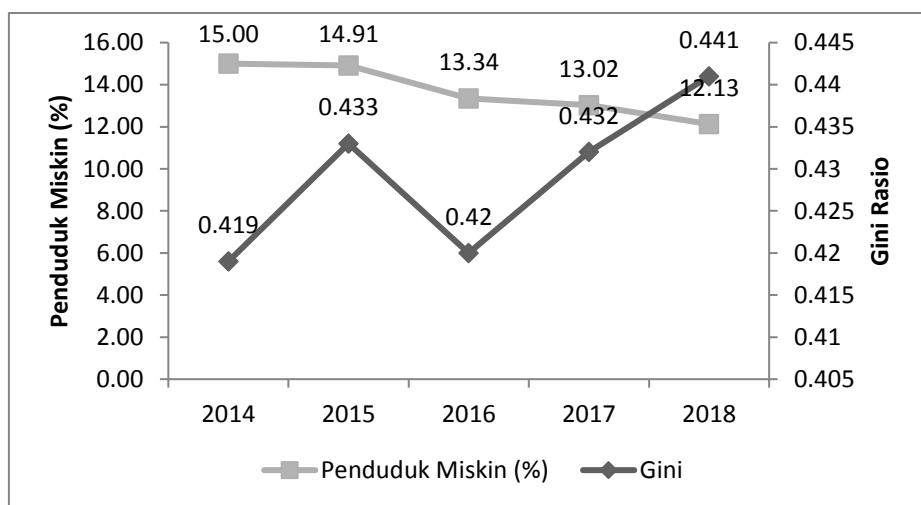
Variabel ekonomi seringkali tidak hanya mempunyai hubungan satu arah, namun juga dapat menunjukkan hubungan dua arah yang bersifat kausalitas atau saling mempengaruhi. Contohnya, variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan

naik/turunnya persentase penduduk miskin, dan sebaliknya pengangguran pun dapat mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena kausalitas ini merupakan hubungan dua arah, maka dalam model kausalitas ini seluruh variabel merupakan variabel dependen. Salah satu metode atau model yang dapat digunakan untuk mendeteksi model kausalitas adalah model persamaan kausalitas Granger. Untuk menyelesaikan model kausalitas antara variabel X dan Y, ada empat model regresi yang dihitung. Dua model regresi (persamaan *unrestricted* dan persamaan *restricted*) dihitung untuk menguji apakah X mempengaruhi Y, dan dua model regresi yang sama dihitung untuk menguji apakah Y mempengaruhi X. Untuk selanjutnya untuk mengambil keputusan apakah X mempengaruhi Y atau sebaliknya digunakan uji F. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F table maka X mempengaruhi Y, demikian sebaliknya. Oleh karena hasil model persamaan kausalitas Granger sangat sensitive terhadap panjangnya periode waktu yang digunakan dalam model maka interpretasinya harus dilakukan dengan hati-hati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Merujuk pada literatur beberapa penelitian, kemiskinan mempunyai hubungan timbal balik dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun untuk menyimpulkan permasalahan tersebut untuk kasus yang multidimensi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang unik.



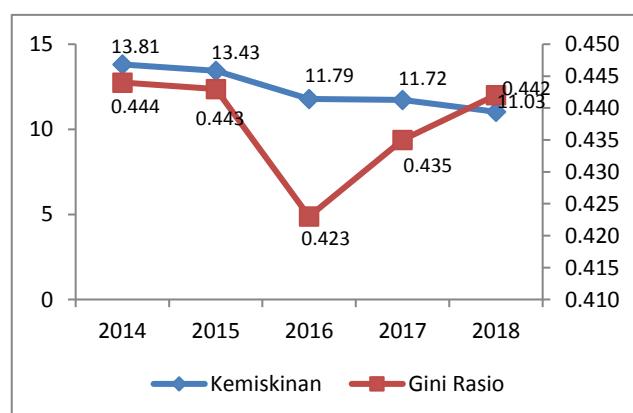
Gambar 1.
Percentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2014-2018

Untuk mendalami permasalahan DIY berdasarkan data empiris terkini diambil referensi periode tahun penelitian lima tahun terakhir, yaitu 2014-2018. Pada periode tersebut tren indeks kemiskinan terus menurun, namun untuk indeks ketimpangan distribusi pendapatan (gini rasio/GR)

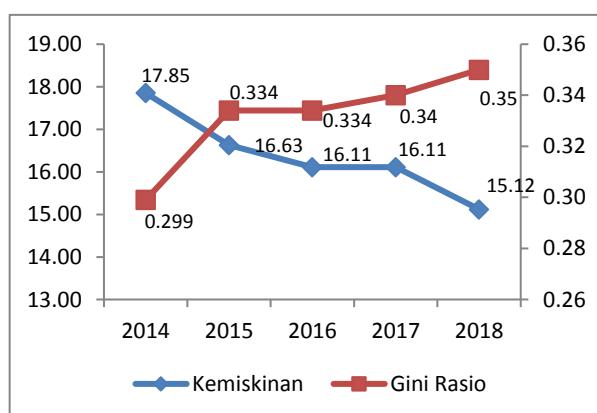
hanya terjadi pada periode 2015-2016. Pada periode ini terjadinya penurunan indeks kemiskinan dibarengi dengan penurunan indeks ketimpangan distribusi pendapatan. Fenomena secara umum menggambarkan bahwa kelompok penduduk yang terkategorikan berpendapatan di bawah garis kemiskinan dibarengi dengan berkurangnya tingkat kesenjangan antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah. Indikator ketimpangan lain, yaitu Ukuran Bank Dunia, menjelaskan bahwa pada tahun 2016 kelompok 40 persen penduduk terbawah porsi pengeluarannya sedikit menurun. Hal ini berarti kelompok ini menerima lebih sedikit porsi kue ekonomi dibanding tahun sebelumnya. Sementara 20 persen penduduk tertinggi juga lebih sedikit menerima porsi ekonomi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan porsi kue ekonomi diterima oleh 40 persen penduduk menengah dan ternyata ini mampu menghasilkan penurunan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

Namun di periode tahun yang lain mengalami anomali. Pada kurun 2016-2018, angka kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan distribusi pendapatan justru meningkat. Dilihat dari ukuran ketimpangan Bank Dunia, nampak bahwa porsi kue ekonomi yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah dan 40 persen menengah pada tahun 2017 dan 2018 lebih sedikit dibanding tahun 2016, sementara yang diterima oleh kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi meningkat. Hal ini mencirikan bahwa penurunan persentase penduduk miskin belum mampu meningkatkan kesejahteraannya karena ternyata mereka lebih sedikit memperoleh porsi kue ekonomi pembangunan. Jadi, penduduk miskin baru sedikit terangkat ke atas garis kemiskinan tetapi belum meningkat kesejahteraannya.

Ditilik menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, indeks kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai pola hubungan yang berbeda. Di daerah perkotaan pada periode 2014-2015 menurunya persentase kemiskinan dibarengi oleh menurunnya indeks ketimpangan distribusi pendapatan. Di sisi lain, tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sedikit melambat. Hal ini mencerminkan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menyebabkan



Gambar 2.
Percentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio di Daerah
Istimewa Yogyakarta Perkotaan,
2014-2018



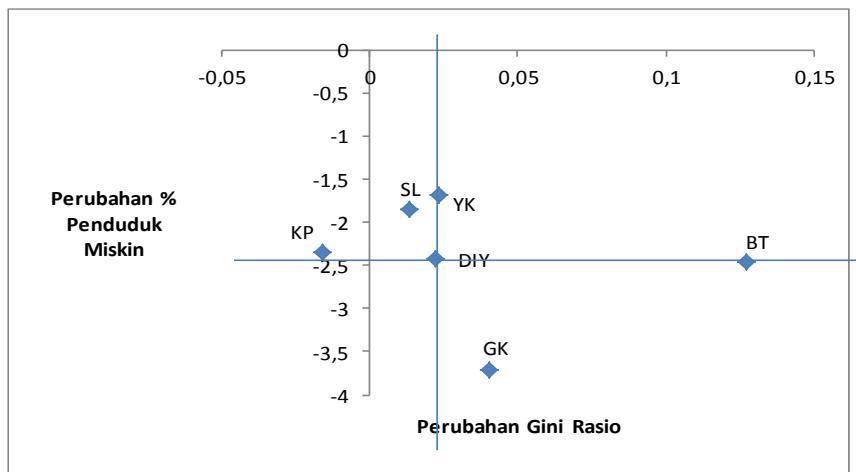
Gambar 3.
Percentase Penduduk Miskin dan Gini Rasio di Daerah
Istimewa Yogyakarta Perdesaan,
2014-2018

peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketahanan ekonomi di tingkat masyarakat masih terjaga meskipun makro ekonomi sedang lesu. Bahkan, penurunan angka kemiskinan semakin konsisten di tahun-tahun berikutnya meskipun tidak didukung oleh peningkatan pemerataan distribusi pendapatan (Gambar 2).

Fenomena yang berbeda terjadi di wilayah perdesaan. Selama periode penelitian, angka kemiskinan konsisten cenderung menurun (Gambar 3). Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan dan implementasi program pengentasan kemiskinan berjalan cukup efektif. Namun demikian keberhasilan tersebut belum diikuti dengan pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Padahal, logika teoritis seharusnya sejalan. Ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran antarpenduduk yang terlihat dari angka gini rasio masih belum menunjukkan arah perbaikan. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari kondisi ini supaya program pengentasan kemiskinan mampu mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan sehingga mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang sesungguhnya.

Mencermati angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan kondisi terakhir Maret 2018, ternyata sebaran kedua indikator ini tidak mengikuti pola tertentu. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang angka kemiskinannya sudah di bawah 8 persen, ternyata masih mempunyai ketimpangan yang relatif tinggi. Sementara itu Kabupaten Gunungkidul yang memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, yaitu 17,12 persen (Maret 2018), namun ternyata memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah. Kondisi serupa Gunungkidul adalah Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan angka kemiskinan tertinggi di DIY, 18,3 persen namun angka gini rasio juga lebih relatif rendah dibanding dengan Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Fenomena yang berbeda dimiliki Bantul karena dengan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi ternyata angka ketimpangan distribusi pendapatan juga masih relatif tinggi.

Lebih lanjut, dilihat hubungan antara perubahan angka kemiskinan dan gini rasio selama periode lima tahun terakhir untuk kabupaten/kota di DIY menjelaskan bahwa hubungan yang terbalik antara perubahan persentase penduduk miskin dan perubahan gini rasio, yaitu penurunan persentase penduduk miskin diikuti oleh kenaikan gini rasio, dimiliki oleh Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sementara itu hanya Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai hubungan searah antara perubahan persentase kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Hubungan perubahan ini menjelaskan penurunan kemiskinan diiringi dengan penurunan ketimpangan pendapatan (Gambar 4).



Gambar 4.

Hubungan antara Perubahan Persentase Penduduk Miskin (P_0) dan Perubahan Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota, 2014-2018

Hubungan Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada bagian ini diuraikan mengenai bagaimana hubungan yang terjadi antara tingkat ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah terjadi hubungan timbal balik ataukah hubungan satu arah? Metode yang digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antara dua variabel adalah model kausalitas yang dikembangkan oleh Granger atau dikenal dengan nama *Granger Causality Test* (uji kausalitas Granger). Dengan menggunakan model ini dapat dilihat apakah dua variabel mempunyai hubungan searah ataukah hubungan dua arah (timbal balik). Data yang digunakan adalah Gini Rasio dan *Headcount Index* (P_0) periode 2008-2018.

Tabel 1 menyajikan hasil dari kausalitas Granger dengan menggunakan 3 *lag* waktu. Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut tidak ada hubungan timbal balik yang terjadi antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan baik pada *lag* 1, *lag* 2, maupun *lag* 3. Baik pada *lag* 1, *lag* 2 maupun *lag* 3 tingkat kemiskinan tidak signifikan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Demikian sebaliknya, pada *lag* 1, *lag* 2, dan *lag* 3 ketimpangan pendapatan tidak menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Tabel 1.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 01/31/19 Time: 08:07
Sample: 2008 2018
Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PO does not Granger Cause GR	10	3.14383	0.1195
GR does not Granger Cause PO		0.39827	0.5480

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 01/31/19 Time: 08:09

Sample: 2008 2018

Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PO does not Granger Cause GR	9	0.52076	0.6295
GR does not Granger Cause PO		0.85299	0.4914

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 01/31/19 Time: 08:09

Sample: 2008 2018

Lags: 3

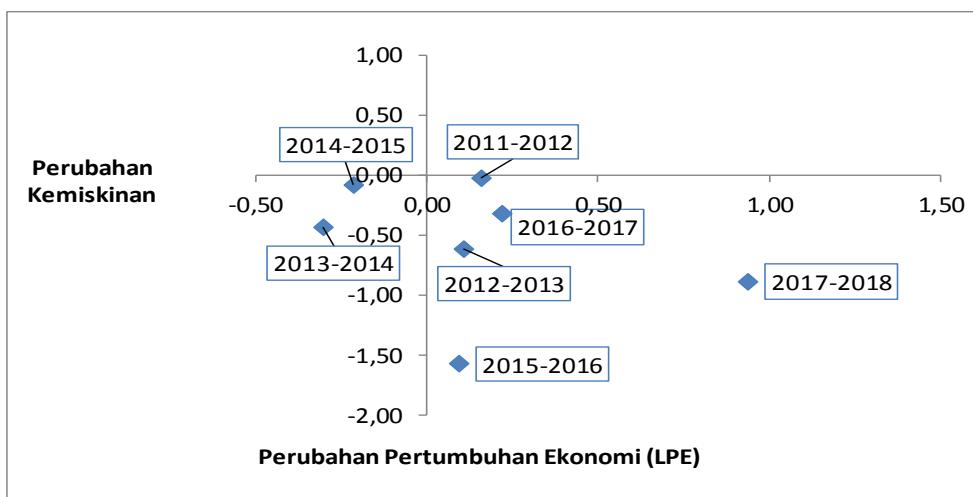
Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PO does not Granger Cause GR	8	0.12364	0.9346
GR does not Granger Cause PO		0.91901	0.6265

Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Perkembangan insiden kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada periode 2011-2018 dapat dilihat pada Gambar 5. Untuk melihat apakah terdapat hubungan baik searah maupun timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dilakukan pengamatan dengan membandingkan tren perkembangan keduanya. Terlihat bahwa hubungan yang searah terjadi pada periode 2013-2015, yaitu pada periode tersebut terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,47 persen pada 2013 menjadi 4,95 persen pada 2015 sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 15,43 persen menjadi 14,91 persen. Sementara itu untuk periode 2011-2013 dan periode 2015-2018 terjadi hubungan yang terbalik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2011-2013, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 5,21 persen menjadi 5,47 persen, sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 16,08 persen menjadi 15,43 persen pada 2013. Demikian pula pada periode 2015-2018, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Gambaran tersebut dapat pula dilihat pada Gambar 6, hubungan searah dapat dilihat pada Kuadran III yaitu periode 2013-2014 dan 2014-2015 yang menjelaskan terjadinya penurunan persentase penduduk miskin yang diiringi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sementara hubungan terbalik dapat dilihat pada Kuadran IV yaitu periode 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018. Pada periode-periode tersebut kenaikan pertumbuhan ekonomi dibarengi oleh penurunan persentase penduduk miskin.



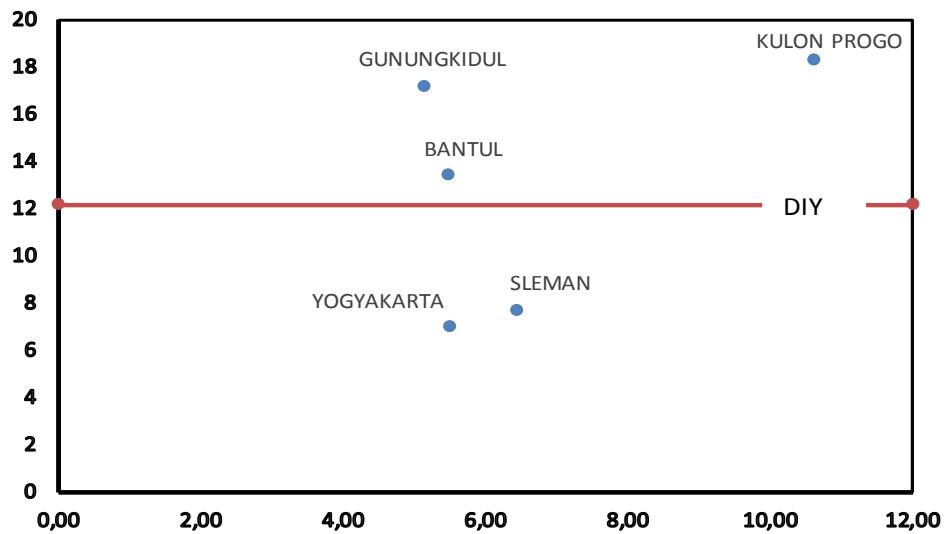
Gambar 5.
Percentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi, 2011-2018



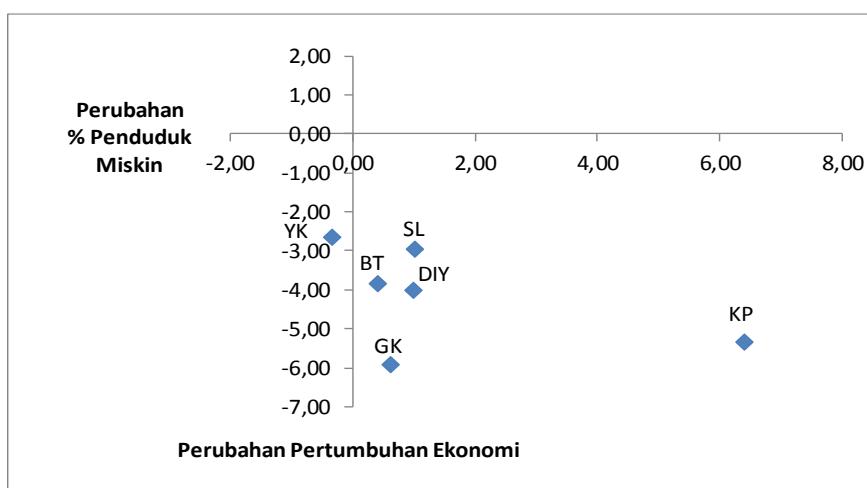
Gambar 6.
Hubungan antara Perubahan Percentase Penduduk Miskin (P_0) dan
Perubahan Pertumbuhan Ekonomi, 2011-2018

Gambar 7 menyajikan sebaran kabupaten/kota menurut besarnya pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin tahun 2018. Terlihat pada gambar tersebut bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada level kabupaten/kota tidak mengikuti pola tertentu. Kabupaten Gunungkidul yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah, tingkat kemiskinannya tertinggi kedua. Tidak jauh berbeda, Kabupaten Bantul juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah di antara kabupaten/kota yang lain namun tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah 10 persen dan di bawah angka provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase penduduk miskin yang tertinggi, namun adanya mega proyek pembangunan bandara baru Yogyakarta selama dua tahun terakhir ternyata mampu melesatkan pertumbuhan ekonominya sehingga menjadi tertinggi di antara kabupaten/kota yang lain. Pertumbuhan ekonomi Kulon Progo ini belum banyak mengungkit

ekskalasi aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduknya sehingga belum mampu mengurangi angka kemiskinan di Kulon Progo.



Gambar 7.
Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin menurut
Kabupaten/Kota, 2018



Gambar 8.
Hubungan antara Perubahan Pertumbuhan Ekonomi dan perubahan
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota, 2011-2018

Gambar 8 menyajikan hubungan antara perubahan pertumbuhan ekonomi dan perubahan persentase penduduk miskin (P_0) periode 2011-2018 menurut kabupaten/kota. Dari gambar tersebut terlihat bahwa hubungan yang terbalik antara perubahan persentase penduduk miskin dan perubahan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh empat kabupaten karena kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin (kuadran IV). Sementara itu Kota Yogyakarta mempunyai hubungan searah yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi diiringi oleh penurunan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat namun program pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta tetap mampu mengurangi angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan distribusi pendapatan merupakan tiga masalah pokok yang menjadi isu pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta secara makro menunjukkan performa yang baik, namun dari sisi lain realitas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menyelimuti sebagian besar penduduk. Berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan analisis kualitas pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta belum berkualitas karena belum membawa dampak yang signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan dan pemerataan hasil pembangunan yang tercermin dari angka Gini Rasio.

Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat diestimasi dengan perilaku siklikal (*cyclical behavior*) ketiga indikator tersebut dalam suatu periode tertentu. Hasil dari uji kausalitas Granger dengan menggunakan tiga waktu adalah pertumbuhan ekonomi lepas kaitan dengan masalah kemiskinan baik untuk *lag 1*, *lag 2*, maupun *lag 3*. Demikian pula kemiskinan juga lepas kaitan dengan masalah ketimpangan pendapatan baik untuk *lag 1*, *lag 2*, maupun *lag 3*.

Selama periode analisis, baik 2011-2018 maupun 2014-2018, pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan fluktuatif, namun angka kemiskinan secara konsisten terus mengalami penurunan. Artinya, ketika makro perekonomian mengalami perlambatan tidak mengganggu program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Untuk itu program-program pengentasan kemiskinan direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan di lapangan.

Tren pengurangan angka kemiskinan ketimpangan belum dibarengi maupun diikuti oleh pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan. Angka ketimpangan distribusi pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif masih tinggi menjadi masalah yang serius untuk diurai dengan melakukan penelitian menemukan faktor-faktor krusial penyebabnya. Dalam artikel ini belum sampai pada menganalisis hal ini. Untuk itu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan kontribusi penyelesaian masalah anomali pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta karena indikator-indikator sosial cukup bagus prestasinya, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia, serta Indeks Kemiskinan Multidimensi.